

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UPAH MINIMUM DAN PENDAPATAN PERKAPITATERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MIMIKA

Yosmiyanti Tandidatu¹, Wanya Sahdina Fatimah², Beni Erens Bilmaskosu³
yosmiyantitandidatu@gmail.com¹, wnyanana02@gmail.com², erensbi15@gmail.com³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Pendapatan Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika. Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan berasal dari data sekunder, yaitu data yang di publikasikan oleh BPS dan BAPENDA Kabupaten Mimika periode 2014 sampai 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika.

Kata Kunci: Pad, Umk, Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue (PAD), District Minimum Wage (UMK) and Per Capita Income on Economic Growth in Mimika Regency. The research method used is associative using multiple linear regression analysis. The data used comes from secondary data, namely data published by BPS and BAPENDA Mimika Regency for the period 2014 to 2023. The results of this study indicate that Regional Original Revenue (PAD) has no significant effect on Economic Growth, while District Minimum Wage (UMK) and Per Capita Income have a significant effect on Economic Growth in Mimika Regency.

Keywords: Local Own-Source Revenue, District Minimum Wage, Per Capita Income, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Mimika adalah kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah, merupakan daerah dengan potensi ekonomi yang besar, didukung oleh sumber daya alam yang kaya, seperti tambang emas, tembaga, serta peluang di sektor-sektor yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, Mimika telah mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup menonjol dibandingkan kabupaten lain di wilayah tersebut. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat berbagai tantangan yang menghambat pemanfaatan maksimal potensi ekonomi daerah tersebut. Salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan, terutama operasional tambang berskala besar seperti PT Freeport Indonesia. Ketergantungan ini menciptakan struktur ekonomi yang kurang seimbang, dengan kontribusi sektor lain, seperti pertanian, perikanan dan sektor lainnya dan UMKM yang mempunyai peluang yang besar, masih relatif rendah. Hal ini menyebabkan ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan kebijakan terkait industri tambang.

Selain itu, infrastruktur dasar di Kabupaten Mimika, seperti transportasi, energi, dan komunikasi, masih belum merata. Keterbatasan aksesibilitas di daerah terpencil menyulitkan pengembangan potensi ekonomi lokal dan memperlambat distribusi hasil produksi. Masalah lain yang tak kalah penting adalah rendahnya kualitas sumber daya

manusia, yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang belum memadai, sehingga menghambat upaya diversifikasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah. Indikator ini menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan kemajuan dari segi kuantitas, tetapi juga mencerminkan kualitas kehidupan masyarakat melalui perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dalam kajian ekonomi dan perencanaan pembangunan.

Menurut Sukirno (2016:423) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Menurut Rapanna dan Zulfikry (2017:6) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah fenomena yang sangat penting bagi suatu negara untuk meningkatkan perekonomiannya, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Kusumawardani & Nuraini, 2020). Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan suatu negara untuk meningkatkan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi. Tahun 2014-2023

PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MIMIKA (persen)	
TAHUN	JUMLAH
2014	0,6
2015	6,5
2016	13,5
2017	3,7
2018	10,4
2019	-38,52
2020	11,44
2021	36,85
2022	15,31
2023	7,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Dari tabel 1, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika selama periode 2014 hingga 2023 menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi tercatat cukup rendah, yaitu 0,6%, namun meningkat tajam menjadi 13,5% pada tahun 2016, menandakan adanya penguatan ekonomi dalam periode tersebut. Setelah mencapai puncaknya, pertumbuhan melambat menjadi 3,7% pada tahun 2017, tetapi kembali meningkat ke 10,4% pada tahun 2018. Tahun 2019 menjadi titik balik dengan kontraksi ekonomi yang signifikan sebesar -38,52%, disebabkan oleh gangguan besar pada sektor utama seperti pertambangan atau dampak dari faktor eksternal lainnya, disaat bertepatan dari awal mulai Pandemi Covid19. Setelah kontraksi tersebut, ekonomi Kabupaten Mimika mulai pulih secara bertahap, dengan pertumbuhan mencapai 11,44% pada tahun 2020. Pemulihan yang luar biasa

terjadi pada tahun 2021, di mana pertumbuhan mencapai 36,85%, menjadi salah satu tahun dengan kinerja ekonomi terbaik dalam dekade tersebut. Namun, setelah pemulihan besar ini, laju pertumbuhan mulai melambat tetapi tetap positif, yaitu 15,31% pada tahun 2022 dan 7,9% pada tahun 2023. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan laju Pertumbuhan Ekonomi yang baik dipengaruhi oleh berbagai factor yang mempengaruhinya, seperti Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten dan Pendapatan Perkapita. Dari variable-variabel ini yang mempunyai peran untuk meningkatkan laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2023

PAD KABUPATEN MIMIKA (juta Rupiah)	
TAHUN	JUMLAH
2014	Rp185.317.260.669,00
2015	Rp332.182.531.621,00
2016	Rp271.818.307.831,00
2017	Rp366.471.582.445,00
2018	Rp278.876.435.912,00
2019	Rp310.710.000.000,00
2020	Rp311.450.000.000,00
2021	Rp891.290.000.000,00
2022	Rp1.089.120.000.000,00
2023	Rp1.705.283.269.799,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika selama periode 2014–2023 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dengan nilai PAD meningkat dari Rp185,3 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp1,7 triliun pada tahun 2023. Meskipun secara umum ada pertumbuhan, beberapa tahun mengalami fluktuasi. Pada 2017, PAD meningkat tajam dari Rp271,8 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp366,4 miliar, namun pada 2018 mengalami penurunan menjadi Rp278,8 miliar. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan, dengan lonjakan signifikan pada 2021 ke 2022, di mana PAD meningkat dari Rp891,2 miliar menjadi Rp1,089 triliun. Kenaikan luar biasa terjadi pada 2023, di mana PAD mencapai Rp1,7 triliun, meningkat hampir 60% dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan ini disebabkan oleh upaya optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan investasi, serta kebijakan pemerintah daerah yang memaksimalkan potensi lokal.

Menurut Halim (2004:94), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai indikator kemandirian keuangan daerah, PAD menunjukkan sejauh mana suatu wilayah mampu memanfaatkan sumber dayanya sendiri untuk mendanai pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat. PAD diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pendapatan sah lainnya. Upaya optimalisasi PAD dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor produktif lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Manduapessy, 2020), penelitian yang

dilakukan di kantor BAPENDA Kabupaten Mimika. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki Pemerintah Mimika akan tinggi dan tingkat kemandirian akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa apabila PAD meningkat akan mendorong kemandirian daerah Kabupaten Mimika dalam membangun infrastruktur. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai secara tidak langsung penerimaan PAD akan merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Hal ini juga sejalan (Mulyani et al., 2021), penelitian yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur, bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3. Upah Minimum Kabupaten. Tahun 2014-2023.

UMK KABUPATEN MIMIKA (juta Rupiah)	
TAHUN	JUMLAH
2014	Rp2.230.000,00
2015	Rp2.435.000,00
2016	Rp2.487.474,00
2017	Rp3.098.538,00
2018	Rp3.368.421,00
2019	Rp3.647.999,00
2020	Rp3.958.444,00
2021	Rp3.958.444,00
2022	Rp4.052.776,00
2023	Rp4.423.605,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Data Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mimika periode 2014–2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari Rp2.230.000 pada tahun 2014 menjadi Rp4.423.605 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk menyesuaikan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak serta inflasi. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2017, di mana UMK naik sekitar 24,5% dari Rp2.487.474 menjadi Rp3.098.538. Namun, pada tahun 2021, tidak terjadi kenaikan UMK dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Setelah itu, UMK kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, dengan kenaikan signifikan pada tahun 2023 mencapai Rp4.423.605, atau sekitar 9,1% lebih tinggi dibandingkan 2022. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja, meskipun ada tantangan pada masa pandemi yang memengaruhi penyesuaian upah minimum.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan batas upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan para pekerja di suatu kabupaten. UMK berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan perusahaan dalam memberikan upah kepada karyawan dan kebutuhan pokok pekerja untuk hidup layak. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, UMK dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti peningkatan daya beli masyarakat, efisiensi tenaga kerja, dan tingkat investasi. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Mimika umumnya berdampak pada peningkatan daya

beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong konsumsi domestik sebagai salah satu elemen utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Simanjuntak (1985), Menurut Simanjuntak, upah minimum adalah standar gaji terendah yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Penetapan ini dilakukan untuk melindungi tenaga kerja dari upah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar. Teori Standar Kehidupan Layak (Living Wage Theory) Menurut David Ricardo, upah minimum didasarkan pada konsep kebutuhan hidup layak. Upah harus mencukupi kebutuhan dasar pekerja agar mereka dapat hidup dengan standar tertentu. Dalam konteks UMK, teori ini menjadi dasar dalam menetapkan batas minimum upah untuk menjamin kesejahteraan pekerja tanpa mengurangi daya saing perusahaan. Dari hasil penelitian (Trisantoso Julianto, 2016) yang dilakukan di Kota Surabaya menyatakan Upah Minimum Kabupaten berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya. Semakin tinggi UMK di Kota Surabaya maka akan semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya. Hal ini juga sejalan dengan (Virginanda, 2013) penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah, menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jika ada perubahan atau kenaikan UMK maka pertumbuhan ekonomi juga akan berubah dan mengalami kenaikan.

Tabel 4. Pendapatan Perkapita. Tahun 2014-2023

PENDAPATAN PERKAPITA (juta rupiah)	
TAHUN	JUMLAH
2014	Rp10.873.455,00
2015	Rp10.952.200,00
2016	Rp11.169.123,00
2017	Rp11.591.000,00
2018	Rp11.700.674,00
2019	Rp12.035.334,00
2020	Rp11.431.112,00
2021	Rp11.400.369,00
2022	Rp11.647.431,00
2023	Rp12.076.879,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Pendapatan per kapita Kabupaten Mimika selama periode 2014 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan, meskipun ada sedikit fluktuasi. Pada 2014, pendapatan per kapita tercatat sebesar Rp10.873.455 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp12.035.334 pada 2019. Namun, pada 2020 terjadi penurunan menjadi Rp11.431.112, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Penurunan kecil kembali terjadi pada 2021, tetapi pendapatan per kapita mulai pulih pada 2022 dengan nilai Rp11.647.431 dan terus meningkat pada 2023 menjadi Rp12.076.879. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika yang relatif stabil, meskipun sempat terganggu oleh faktor eksternal seperti pandemi. Pemulihan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Perkapita adalah ukuran yang penting untuk menghitung rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya dalam setahun. Ukuran ini dihitung dengan membagi total Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB suatu wilayah atau negara dengan jumlah penduduknya. Pendapatan perkapita sering digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan

masyarakat dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Paul Samuelson dan William Nordhaus (1996), Menurut Samuelson dan Nordhaus, pendapatan per kapita adalah ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara atau wilayah. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sering digunakan sebagai ukuran standar hidup di suatu negara. Sukirno (2000) Menurut Sukirno, pendapatan per kapita adalah hasil pembagian pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB) dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Pendapatan per kapita digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran ekonomi suatu masyarakat.

Pendapatan perkapita sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian berkembang dan PDB mengalami kenaikan, pendapatan perkapita juga dapat meningkat, terutama jika jumlah penduduk tetap atau bertambah secara sebanding. Peningkatan pendapatan perkapita menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan daya beli, konsumsi, investasi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Di Kabupaten Mimika, pendapatan perkapita dapat menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pengelolaan sumber daya alam berhasil dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, jika pendapatan perkapita masyarakat tidak meningkat secara substansial, maka manfaat dari pertumbuhan tersebut belum dirasakan merata oleh seluruh penduduk. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong pengembangan sektor ekonomi yang inklusif dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Setyowati, 2022), hasilnya menyatakan bahwa Pendapatan Perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Semakin tinggi Pendapatan Perkapita di Indonesia maka laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia juga meningkat. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Nurhayati, 2015), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, pendapatan perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Perkapita, Berarti pendapatan yang meningkat belum mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi.

Dari hasil latar belakang di atas, dapat di simpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten, Dan Pendapatan Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab-akibat antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan alat bantu software SPSS dengan menerapkan teknik analisis regresi linear berganda. Teknik ini dipilih untuk mengevaluasi hubungan antar variabel independen terhadap satu variabel dependen, yang dimana variabel Independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten dan Pendapatan Perkapita, dan Dependennya adalah Pertumbuhan Ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah nilai residual dari sebuah model regresi berdistribusi normal. Model regresi dianggap memenuhi kriteria yang baik jika distribusi residualnya bersifat normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Signifikansi $> 0,05$ maka dikatakan nilai tersebut berdistribusi normal, jika nilai Signifikansinya $< 0,05$ maka dikatakan nilai tersebut tidak berdistribusi normal. Dibawah ini hasil uji normalitas Kolgomogorov-Smirnov dengan SPSS:

Tabel 5. Uji Normalitas

N	10
Test Statistic	.186
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

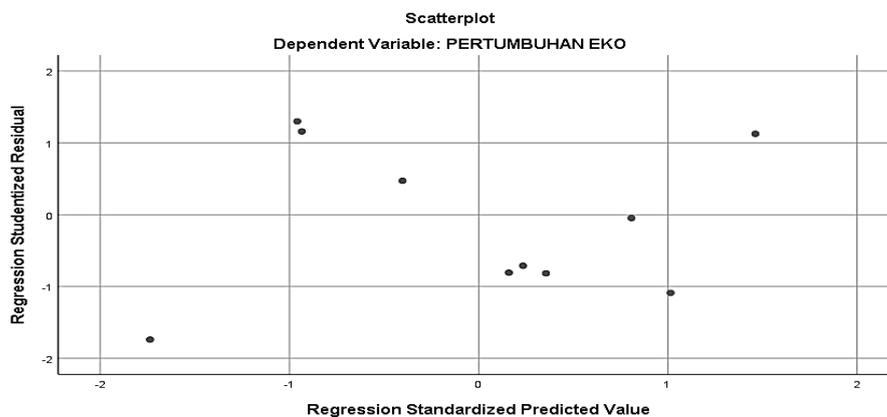
a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Output SPSS

Dari hasil diatas, nilai signifikansinya sebesar $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari data terbukti normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model memiliki varians yang konsisten (homoskedastisitas) atau tidak (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik harus memiliki varians yang seragam. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan metode grafik, di mana pola penyebaran data di atas dan di bawah angka nol menunjukkan apakah model bebas dari heteroskedastisitas.



Gambar 1. Scatterplot

Dari hasil diatas, bahwa pola sebaran plot tidak beraturan dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Multikolinearitas

Pengujian yang dilakukan agar menilai apakah ada korelasi tinggi pada setiap variable independent satu dan lainnya pada model regresi. Model regresi yang baik jika tidak ada korelasi tinggi antara variable bebas (Independen). Multikolinearitas dilihat dengan nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai $T > 0,1$ dan $VIF < 10$, artinya tidak ada gejala multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics

Model	Tolerance	VIF
PAD	.427	2.117
UMK	.246	4.064
PEN PERKAPITA	.370	2.704

Dependent Variable : PERTUMBUHAN EKO

Sumber : Output SPSS

Pendapatan Asli Daerah(X1) mempunyai Tolerance 0,427 > 0,1 dan VIF 2,117 < 10, Upah Minimum Kabupaten(X2) mempunyai Tolerance 0,246 > 0,1 dan VIF 4,064 < 10, dan Pendapatan Perkapita(X3) mempunyai Tolerance 0,370 > 0,1 dan VIF 2,704 < 10. Yang berarti bebas dari gejala Multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu serta kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam model regresi. Model regresi yang baik apabila tidak mengalami masalah autokorelasi. Nilai Durbin-Watson dapat digunakan untuk mengidentifikasi autokorelasi.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.745

a. Independent Variable : PEN. KAPITA, PAD, UMK

b. Dependent Variable : PERTUMBUHAN EKO

Sumber : Output SPSS

Dari hasil diatas, memperlihatkan nilai DW sebesar 1,745 nilai ini berada diantara -2 dan 2, maka data bebas dari uji autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah model analisis untuk mengetahui hubungan antara variable Independen (bebas) dan variable Dependen (terikat). Analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten dan Pendapatan Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda karena memiliki lebih dari satu variable bebas dan satu variable dependen.

Tabel 8. Uji F (SIMULTAN)

Model	F	Sig.
1	5.397	.039 ^b

a. Dependent Variable : PERTUMBUHAN EKO

b. Predictors : (constant). PEN. PERKAPITA, PAD, UMK

Sumber : Output SPSS

Dari hasil diatas nilai signifikansinya sebesar 0,039 < 0,05 dan nilai F tabel 5.397 > F hitung 3.71. Artinya variable Pendapatan Asli Daerah(X1), Upah Minimum Kabupaten(X2), dan Pendapatan Perkapita(X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variable Dependent PERTUMBUHAN EKONOMI(Y) di Kabupaten Mimika.

Tabel 9. Uji T

Model	t	Sig.
PAD	.789	.460
UMK	2.485	.048
PEN. PERKAPITA	-3.727	.010

a. Dependent Variable : PERTUMBUHAN EKO

Sumber : Output SPSS

Dari hasil diatas, Pendapatan Asli Daerah(X1) dengan nilai koefisien $.789 < t$ hitung 2.228 dan nilai signifikansinya $0,460 > 0,05$ yang artinya berpengaruh positif dan tidak signifikan. Upah Minimum Kabupaten(X2) dengan nilai koefisien 2.485 > t hitung 2.228 dan nilai signifikansinya $0,048 < 0,05$ yang artinya berpengaruh positif dan signifikan. Pendapatan Perkapita(X3) nilai koefisien $-3.727 > t$ hitung 2.228 dan signifikansinya $0,010 < 0,05$ yang artinya berpengaruh negative dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi(Y) di Kabupaten Mimika.

Uji determinasi (R-squared) dalam analisis regresi digunakan untuk melihat seberapa banyak perubahan pada variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independen dalam model yang digunakan. Dengan kata lain, R-squared memberikan gambaran tentang seberapa baik model regresi dapat menggambarkan atau memprediksi data yang ada.

Tabel 10. Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.854 ^a	.730	.594

a. Independent Variable : PEN.PERKAPITA, PAD, UMK

b. Dependent Variable : PERTUMBUHAN EKO

Sumber : output SPSS

Nilai R Square sebesar 0,730 artinya variable independent Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten dan Pendapatan Perkapita mempunyai pengaruh sebesar 73% terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan 27% sisanya terpengaruh dari variable yang lain.

Pembahasan**Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika.**

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika. Semakin tinggi PAD pendapatan asli daerah, maka laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten akan meningkat. Meskipun PAD memberikan dampak terhadap meningkatnya perekonomian di Mimika, dampaknya belum cukup kuat untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Meskipun Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika meningkat selama 10 tahun terakhir, dikarenakan proporsi PAD terhadap total PDRB begitu kecil, besarnya PAD belum tentu memberikan dampak signifikan jika kontribusinya terhadap keseluruhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) relatif kecil. Di Kabupaten Mimika, sektor seperti pertambangan lebih mendominasi struktur ekonomi, sehingga PAD yang berasal dari sektor-sektor lain menjadi kurang terasa dalam memengaruhi pertumbuhan.

Musgrave dan Musgrave (1989). Dalam teori keuangan publik, Musgrave menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah sangat penting untuk menciptakan otonomi fiskal. Namun, kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada seberapa efektif daerah menggunakan dana tersebut untuk pembangunan ekonomi yang produktif.

Terjadinya Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Mimika, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar, dapat terjadi karena alokasi dan distribusi hasil PAD yang tidak merata. Besarnya PAD tidak otomatis menjamin seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat yang setara. Salah satu penyebabnya adalah dominasi belanja rutin dibandingkan dengan investasi produktif. Ketika PAD digunakan lebih banyak untuk operasional pemerintahan daripada pembangunan infrastruktur atau pengembangan

sektor strategis, maka kontribusinya terhadap perekonomian menjadi kecil. Selain itu, ketergantungan pada sektor tertentu, seperti pertambangan, yang padat modal tetapi minim penyerapan tenaga kerja, juga memperparah ketimpangan. Akibatnya, sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang tidak bekerja di sektor dominan tersebut, tidak menikmati manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Manduapessy, 2020). Penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Mimika, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika. Yang artinya Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki Pemerintah Mimika akan tinggi dan tingkat kemandirian akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa apabila PAD meningkat akan mendorong kemandirian daerah Kabupaten Mimika dalam membangun infrastruktur. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai secara tidak langsung penerimaan PAD akan merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. (Gunawan & Suebah, 2022) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kota Serang menyatakan, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pendanaan pemerintah Kota Serang untuk mendanai segala kebutuhan daerahnya terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang akan mendorong meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang.

Upah Minimum Kabupaten terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika.

Dari hasil penelitian Upah Minimum Kabupaten berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika. Kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) di Kabupaten Mimika memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, yang berarti peningkatan UMK berkontribusi pada peningkatan kegiatan ekonomi. Hal ini terjadi karena pendapatan pekerja yang lebih tinggi meningkatkan daya beli mereka, sehingga mendorong konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini mempercepat perputaran uang dalam perekonomian lokal, yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dampak yang signifikan menunjukkan bahwa pengaruh UMK terhadap pertumbuhan ekonomi cukup kuat dan konsisten, menandakan pentingnya kebijakan UMK dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah di Kabupaten Mimika.

John Maynard Keynes (1939). Keynes menekankan bahwa peningkatan pendapatan, termasuk melalui kebijakan upah minimum, dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini mendorong konsumsi agregat yang menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, kenaikan UMK dapat menggerakkan aktivitas ekonomi lokal karena peningkatan konsumsi pekerja.

Hasil ini sejalan dengan (Trisantoso Julianto, 2016). Yang dilakukan di Kota Surabaya menyatakan Upah Minimum Kabupaten berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya. Semakin tinggi UMK di Kota Surabaya maka akan semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya. Sejalan juga dengan penelitian oleh (Virginanda, 2013). penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah, menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jika ada perubahan atau kenaikan UMK maka pertumbuhan ekonomi juga akan berubah dan mengalami kenaikan.

Pendapatan Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika.

Dari hasil penelitian, Pendapatan perkapita yang berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa meskipun pendapatan rata-rata penduduk tinggi, hal ini tidak secara langsung mendorong perkembangan ekonomi yang lebih luas. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan distribusi pendapatan, di mana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga tidak merata ke seluruh masyarakat. Selain itu, ekonomi Mimika yang banyak bergantung pada sektor pertambangan membuat pendapatan besar dari sektor ini tidak selalu mendorong kegiatan ekonomi lain yang lebih beragam. Akibatnya, meskipun angka pendapatan per kapita meningkat, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah justru terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih merata dan fokus pada pengembangan sektor-sektor produktif lainnya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi adalah rendahnya diversifikasi ekonomi. Ketika pendapatan hanya bersumber dari satu sektor utama tanpa investasi di sektor lain, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Pendapatan tinggi juga dapat menyebabkan efek konsumsi yang tidak produktif, di mana sebagian besar pengeluaran digunakan untuk barang-barang mewah atau kebutuhan di luar daerah, sehingga tidak mendorong pertumbuhan lokal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zasriati, 2022). Penelitian yang dilakukan di Provinsi Jambi tahun 2016-2020. Hasilnya penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. Artinya, semakin tinggi Pendapatan Perkapita maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan meningkat dikarenakan daya beli masyarakat yang meningkat.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini menemukan bahwa variable Independen (bebas) Upah Minimum Kabupaten mempunyai pengaruh positif, Pendapatan perkapita mempunyai pengaruh negative namun keduanya secara signifikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika. Hal ini menunjukkan bahwa, kenaikan upah minimum di Kabupaten Mimika berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, menariknya, peningkatan pendapatan per kapita justru tidak mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Meskipun PAD juga berkontribusi positif, pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Temuan ini menyoroti pentingnya kebijakan upah yang tepat dan pengelolaan sumber daya daerah yang efisien untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kebijakan upah minimum memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam mengoptimalkan pengelolaan PAD dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, penting untuk merancang kebijakan yang dapat meratakan distribusi pendapatan dan mendorong investasi produktif."

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran berikut dapat diajukan:

Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan upah yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong konsumsi dan produksi lokal. Meskipun upah minimum berpengaruh positif, pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan upah seimbang dengan produktivitas agar tidak terjadi inflasi yang merugikan.

Mengingat adanya pengaruh negatif antara pendapatan per kapita dan

pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan ini. Salah satu solusi yang baik yaitu mengembangkan berbagai sektor ekonomi di sektor-sektor yang produktif, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Meskipun PAD berpengaruh positif, namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan PAD yang lebih efisien. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dalam memungut pajak dan retribusi daerah, serta memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan PAD dapat digunakan secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan sektor-sektor ekonomi lain yang memiliki potensi, seperti pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur local di Kabupaten Mimika. Diversifikasi ekonomi akan membantu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, I., & Suebah, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang. *Journal Management Retail*, 02(1), 54-77. <https://doi.org/10.47080/jumerita.v2i%601.1941>
- Manduapessy, R. L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 4(2), 39-57.
- Mulyani, E. S., Sudarman, S., & Astuti, R. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2020. *Educational Studies: Conference Series*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.30872/escs.v1i2.894>
- Nurhayati, M. (2015). Pengaruh kemandirian daerah, investasi pemerintah, angkatan kerja dan pendapatan perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di 33 Provinsi tahun 2008 - 2013. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 1-16. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jimb/article/view/571>
- Sari, S. D., & Setyowati, E. (2022). Analisis Pengangguran, Pendapatan Perkapita, Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2017- 2020. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3(c), 8-18. <https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.195>
- Trisantoso Julianto, F. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 229-256.
- Virginanda, R. R. (2013). Analisis Pengaruh Umk Terhadap Jumlah Tenaga Kerja, Kesejahteraan Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 404.
- Zasriati, M. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan Perkapita Dan Pembentukan Modal Terhadap Perekonomian Di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(1), 41-50. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i1.1134>